



Efektivitas Program Perhutanan Sosial terhadap Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani Hutan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur

Muhammad Rijal Hidayat ^{a,1,*}, Dwi Kartika Sari ^{b,2}, Fajar Nugroho Saputra ^{c,3}

^a Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Indonesia

^b Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

^c Program Studi Agribisnis Kehutanan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Indonesia

¹ muhammadrijalh@unram.ac.id; ² dwikartikasari@ugm.ac.id; ³ fajarnugroho@apps.ipb.ac.id

* Corresponding Author

ABSTRACT

Social forestry programs constitute a strategic forestry policy instrument designed to improve the welfare of communities living around forest areas through legal access to sustainable forest management. This study aims to analyze the effectiveness of social forestry programs in increasing the income of forest farmer groups in Sembalun District, East Lombok Regency. The research employed an empirical juridical approach using a descriptive qualitative method. Data were collected through documentation studies, field observations, and analysis of previous studies related to social forestry, agroforestry, and community forest management in West Nusa Tenggara and other regions in Indonesia. The findings indicate that social forestry programs have a positive impact on increasing community income through the utilization of non-timber forest products, the development of agroforestry systems, and the strengthening of forest farmer group institutions. Income improvement is influenced by legal access to forest land management, commodity diversification, farmer group participation, and institutional support from the government and local communities. However, the effectiveness of the program still faces several challenges, including limited business capital, low managerial capacity of farmer groups, and inadequate market access for forest products. This study argues that the success of social forestry programs is determined not only by legal access to forest areas but also by institutional governance strengthening and the sustainability of community-based forest economies.

Article History

Received 2026-03-05

Revised 2026-04-04

Accepted 2026-04-16

Published 2026-05-24

Keywords

Social Forestry;
Forest Farmer Groups;
Income Improvement;
Agroforestry;
Community Forest
Management

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Program perhutanan sosial menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mendorong pemerataan akses pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Kebijakan ini berkembang sebagai respons terhadap tingginya tingkat kemiskinan masyarakat desa hutan, konflik tenurial, serta kerusakan kawasan hutan akibat pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Dalam konteks global, pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan berkelanjutan karena dinilai mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Perhutanan sosial tidak hanya diposisikan sebagai instrumen konservasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu secara legal dan produktif. Dalam praktiknya, efektivitas program ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan masyarakat, pola pengelolaan sumber daya hutan, serta dukungan kebijakan pemerintah terhadap keberlanjutan usaha masyarakat sekitar kawasan hutan.

Di Indonesia, implementasi perhutanan sosial menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama pada wilayah dengan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sumber daya hutan. Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Lombok Timur, termasuk daerah yang memiliki potensi pengembangan perhutanan sosial melalui skema hutan kemasyarakatan dan agroforestri. Kecamatan Sembalun merupakan salah satu kawasan yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang mendukung pelaksanaan program tersebut karena sebagian masyarakat menggantungkan pendapatan pada sektor pertanian dan pemanfaatan kawasan hutan. Keberadaan kelompok tani hutan di wilayah ini menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan program perhutanan sosial karena kelompok tersebut berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan kawasan, pengembangan usaha berbasis hutan, serta mediator antara masyarakat dan pemerintah. Namun demikian, efektivitas program dalam meningkatkan pendapatan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya kapasitas pengelolaan usaha, serta fluktuasi hasil produksi dan pemasaran komoditas kehutanan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program perhutanan sosial memiliki kontribusi terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Fitria dan Arbain (2024) menjelaskan bahwa efektivitas lembaga pengelola hutan nagari dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan kawasan perhutanan sosial. Penelitian Kumbara et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan memberikan dampak terhadap peningkatan aspek ekonomi dan sosial kelompok perhutanan sosial di Kecamatan Sekongkang. Farhan dan Rachman (2023) menemukan bahwa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berupa tuak manis mampu meningkatkan pendapatan petani pengelola hutan kemasyarakatan di Lombok Barat. Penelitian lain juga menegaskan bahwa penerapan sistem agroforestri memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi komoditas pertanian dan kehutanan (Pratami et al., 2023; Tiga et al., 2025). Selain itu, Markum et al. (2021) menegaskan bahwa pola agroforestri tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan melalui peningkatan cadangan karbon kawasan hutan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas dampak ekonomi program perhutanan sosial, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek pengelolaan kawasan, kontribusi hasil hutan bukan kayu, atau pola agroforestri secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas program perhutanan sosial terhadap peningkatan pendapatan kelompok tani hutan di Kecamatan Sembalun masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menempatkan peningkatan pendapatan hanya sebagai indikator ekonomi tanpa mengaitkannya dengan efektivitas kelembagaan kelompok tani hutan sebagai pelaksana utama program. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis hubungan antara efektivitas implementasi program perhutanan sosial, kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan, dan peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini berargumen bahwa keberhasilan program perhutanan sosial tidak hanya ditentukan oleh pemberian akses legal terhadap kawasan hutan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan kelompok tani dalam mengelola sumber daya hutan secara produktif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kajian mengenai hubungan antara perhutanan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi penting karena program ini tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan kehutanan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal berbasis masyarakat. Situmorang dan Noviana (2022) menyatakan bahwa pengelolaan hutan bersama masyarakat mampu meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Yakin et al.

(2019) juga menemukan bahwa program hutan kemasyarakatan memiliki kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan rumah tangga sekitar kawasan hutan di Lombok Tengah. Selain itu, Zet et al. (2022) dan Permatasari et al. (2022) menegaskan bahwa program perhutanan sosial memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengembangan usaha produktif berbasis kawasan hutan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelompok masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan akses pengelolaan hutan secara ekonomi.

Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, perhutanan sosial merupakan bentuk redistribusi akses sumber daya negara kepada masyarakat melalui mekanisme legal yang diatur dalam kebijakan kehutanan nasional. Program ini memberikan legitimasi hukum bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara terbatas dan bertanggung jawab. Mukhtar dan Jannah (2018) menegaskan bahwa pengelolaan hutan kemasyarakatan berbasis kearifan lokal dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Sementara itu, Pratama dan Adiwibowo (2020) menunjukkan bahwa program hutan kemasyarakatan berpengaruh terhadap perubahan sistem tenurial dan peningkatan pendapatan petani. Dengan demikian, efektivitas perhutanan sosial tidak hanya dapat diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari keberhasilan program dalam menciptakan tata kelola hutan yang inklusif, legal, dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program perhutanan sosial terhadap peningkatan pendapatan kelompok tani hutan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum dan kebijakan kehutanan berbasis masyarakat serta menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah dan kelompok tani hutan dalam memperkuat implementasi program perhutanan sosial secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis efektivitas implementasi program perhutanan sosial terhadap peningkatan pendapatan kelompok tani hutan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian berfokus pada hubungan antara kebijakan perhutanan sosial, praktik pengelolaan kawasan hutan oleh kelompok tani, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan sebagaimana telah dikaji dalam penelitian Kumbara et al. (2024), Fitria dan Arbain (2024), serta Zet et al. (2022). Kecamatan Sembalun dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki potensi pengelolaan hutan kemasyarakatan dan aktivitas agroforestri yang berkembang dalam skema perhutanan sosial

sebagaimana ditemukan dalam berbagai penelitian mengenai hutan kemasyarakatan dan agroforestri di Nusa Tenggara Barat (Mukhtar & Jannah, 2018; Markum et al., 2021).. Selain itu, sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut masih bergantung pada sektor pertanian dan hasil hutan sebagai sumber pendapatan utama sehingga relevan untuk menganalisis efektivitas kebijakan perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas pengelolaan kawasan hutan oleh kelompok tani hutan di Kecamatan Sembalun serta melalui wawancara dengan pengurus dan anggota kelompok

tani hutan yang terlibat dalam program perhutanan sosial. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pola pengelolaan kawasan hutan, jenis usaha produktif yang dikembangkan, tingkat pendapatan masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap regulasi terkait perhutanan sosial, laporan kelembagaan kelompok tani hutan, serta berbagai artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema perhutanan sosial, agroforestri, dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah nasional yang membahas implementasi perhutanan sosial di berbagai daerah di Indonesia, antara lain penelitian Fitria dan Arbain (2024), Kumbara et al. (2024), Farhan dan Rachman (2023), serta Bida dan Nurdin (2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung pola pemanfaatan kawasan hutan dan kegiatan ekonomi masyarakat dalam skema perhutanan sosial. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai pengalaman kelompok tani hutan dalam mengelola kawasan hutan, pola distribusi manfaat ekonomi, serta bentuk dukungan kelembagaan yang diterima masyarakat. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai penelitian sebelumnya untuk membangun kerangka analisis mengenai efektivitas perhutanan sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penelitian Situmorang dan Noviana (2022), Yakin et al. (2019), Permatasari et al. (2022), dan Zet et al. (2022). Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data tersebut dilakukan untuk meningkatkan validitas data melalui proses triangulasi sumber dan informasi.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan teori pengelolaan hutan berbasis masyarakat, konsep pemberdayaan masyarakat, serta pendekatan kebijakan kehutanan sosial dalam perspektif hukum dan pembangunan ekonomi local sebagaimana digunakan dalam penelitian Mukhtar dan Jannah (2018), Pratama dan Adiwibowo (2020), serta Bida dan Nurdin (2025). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis efektivitas kebijakan untuk menilai sejauh mana program perhutanan sosial mampu mencapai tujuan peningkatan pendapatan kelompok tani hutan di Kecamatan Sembalun. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kontribusi baru penelitian terhadap pengembangan kajian perhutanan sosial dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Sembalun

Program perhutanan sosial di Kecamatan Sembalun dilaksanakan melalui pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang melibatkan kelompok tani hutan sebagai pelaksana utama pengelolaan kawasan. Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan secara terbatas dan berkelanjutan melalui kegiatan agroforestri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal. Dalam praktiknya, kelompok tani hutan tidak hanya berfungsi sebagai organisasi produksi, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang mengatur distribusi lahan, pengelolaan hasil hutan, dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan program menunjukkan adanya perubahan pola hubungan masyarakat dengan kawasan hutan. Sebelum program perhutanan sosial berjalan, sebagian masyarakat

memanfaatkan kawasan hutan secara informal dengan tingkat kepastian hukum yang rendah. Setelah adanya legalitas pengelolaan melalui skema perhutanan sosial, masyarakat memperoleh kepastian akses terhadap kawasan hutan sehingga aktivitas ekonomi berbasis kehutanan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan produktif. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Pratama dan Adiwibowo (2020) yang menyatakan bahwa program hutan kemasyarakatan memberikan pengaruh terhadap sistem tenurial masyarakat dan meningkatkan kepastian pengelolaan lahan oleh petani sekitar kawasan hutan.

Implementasi program juga menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan hutan. Kelompok tani hutan mulai menerapkan pola tanam agroforestri dengan mengombinasikan tanaman kehutanan dan tanaman pertanian produktif. Sistem ini memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Markum et al. (2021) menjelaskan bahwa penerapan pola agroforestri mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung cadangan karbon kawasan hutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan agroforestri dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Sembalun tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mendukung aspek ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, implementasi program perhutanan sosial di Kecamatan Sembalun didukung oleh keberadaan kelembagaan kelompok tani hutan yang berfungsi sebagai media koordinasi dan penguatan kapasitas masyarakat. Kelompok tani menjadi sarana distribusi informasi, pengelolaan usaha bersama, dan fasilitasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Fitria dan Arbain (2024) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan kawasan perhutanan sosial dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, partisipasi anggota kelompok, dan dukungan pemerintah terhadap penguatan organisasi masyarakat pengelola hutan. Dengan demikian, keberadaan kelompok tani hutan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program perhutanan sosial di Kecamatan Sembalun.

Efektivitas Program Perhutanan Sosial terhadap Peningkatan Pendapatan Kelompok Tani Hutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program perhutanan sosial memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan kelompok tani hutan di Kecamatan Sembalun. Peningkatan pendapatan terjadi melalui pemanfaatan lahan hutan untuk kegiatan agroforestri, budidaya tanaman produktif, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Diversifikasi usaha tersebut menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil bagi masyarakat dibandingkan dengan pola pertanian konvensional yang hanya bergantung pada satu jenis komoditas.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu menjadi salah satu faktor utama yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat memanfaatkan berbagai hasil hutan seperti kemiri, madu hutan, tanaman hortikultura, dan hasil perkebunan lainnya sebagai sumber pendapatan tambahan. Farhan dan Rachman (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam kawasan hutan kemasyarakatan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan petani. Penelitian Kartila et al. (2018) dan Prtama et al. (2024) juga menunjukkan bahwa hasil hutan bukan kayu berupa kemiri memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap pendapatan petani hutan kemasyarakatan di Lombok Utara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi hasil hutan bukan kayu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Penerapan sistem agroforestri juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan kelompok tani hutan di Kecamatan Sembalun. Sistem agroforestri memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan jangka pendek dari tanaman pertanian sekaligus

pendapatan jangka panjang dari tanaman kehutanan. Tiga et al. (2025) menjelaskan bahwa sistem agroforestri memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan anggota kelompok pengelola hutan kemasyarakatan melalui diversifikasi komoditas dan optimalisasi pemanfaatan lahan. Pratami et al. (2023) juga menemukan bahwa program agroforestri berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui kombinasi tanaman kehutanan dan pertanian produktif. Dengan demikian, penerapan agroforestri di Kecamatan Sembalun menunjukkan efektivitas program perhutanan sosial dalam menciptakan model pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan.

Peningkatan pendapatan masyarakat juga dipengaruhi oleh penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan. Kelompok tani yang memiliki struktur organisasi yang aktif dan partisipatif cenderung lebih mampu mengembangkan usaha produktif dan menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun pihak lain. Harjono et al. (2024) menyatakan bahwa gabungan kelompok tani memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dan peningkatan pendapatan petani. Selain itu, penguatan kelembagaan mendorong masyarakat untuk lebih mudah memperoleh akses bantuan modal, pelatihan, dan pemasaran hasil produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program perhutanan sosial tidak hanya ditentukan oleh akses pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi secara kolektif.

Program perhutanan sosial juga memberikan dampak sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mulai memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga kawasan hutan karena keberlanjutan hutan berhubungan langsung dengan sumber pendapatan mereka. Mukhtar dan Jannah (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan hutan kemasyarakatan berbasis kearifan lokal mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Selain itu, Situmorang dan Noviana (2022) menyatakan bahwa pengelolaan hutan bersama masyarakat dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program perhutanan sosial di Kecamatan Sembalun tidak hanya terlihat pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Faktor Penghambat Efektivitas Program Perhutanan Sosial

Meskipun program perhutanan sosial memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penelitian ini menemukan beberapa faktor yang menghambat efektivitas program di Kecamatan Sembalun. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan modal usaha yang dimiliki kelompok tani hutan. Sebagian besar masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha produktif berbasis kehutanan karena keterbatasan akses pembiayaan dan rendahnya kemampuan investasi usaha. Kondisi ini menyebabkan pengembangan usaha agroforestri dan pemanfaatan hasil hutan belum berjalan secara optimal.

Selain keterbatasan modal, rendahnya kapasitas manajerial kelompok tani hutan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Tidak semua kelompok tani memiliki kemampuan administrasi, pengelolaan usaha, dan pemasaran hasil produksi yang memadai. Akibatnya, beberapa kelompok tani mengalami kesulitan dalam mengelola usaha secara berkelanjutan dan kompetitif. Amiruddin dan Mudhofir (2024) menjelaskan bahwa faktor produksi dan kapasitas pengelolaan usaha memiliki hubungan erat dengan tingkat pendapatan petani hutan kemasyarakatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting dalam mendukung keberhasilan program perhutanan sosial.

Kendala lain yang ditemukan adalah belum optimalnya akses pemasaran hasil hutan dan produk agroforestri. Sebagian besar masyarakat masih menjual hasil produksi melalui rantai distribusi tradisional dengan harga yang relatif rendah. Keterbatasan akses pasar menyebabkan nilai ekonomi hasil hutan belum mampu memberikan keuntungan maksimal bagi kelompok tani hutan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program perhutanan sosial memerlukan dukungan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pemberian akses kawasan hutan, tetapi juga pada pengembangan rantai nilai ekonomi masyarakat berbasis hasil hutan.

Di samping itu, koordinasi antarinstansi dalam pendampingan program perhutanan sosial masih belum berjalan secara optimal. Sebagian kelompok tani hutan masih mengalami keterbatasan pendampingan teknis terkait pengelolaan usaha, pengembangan produk, dan penguatan kelembagaan. Desa (2022) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar hutan memerlukan proses penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan melalui pendampingan dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, keberlanjutan program perhutanan sosial di Kecamatan Sembalun memerlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, kelompok tani hutan, dan pihak terkait lainnya.

Implikasi Hukum dan Kebijakan Perhutanan Sosial terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam perspektif hukum, program perhutanan sosial merupakan bentuk kebijakan afirmatif negara dalam memberikan akses legal kepada masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Legalitas tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan tanpa khawatir terhadap konflik tenurial maupun pembatasan akses yang sebelumnya sering terjadi. Program ini sekaligus menjadi instrumen redistribusi akses sumber daya negara kepada masyarakat desa hutan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis pemberdayaan ekonomi lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas akses kawasan hutan memberikan pengaruh signifikan terhadap keberanian masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif berbasis kehutanan. Masyarakat menjadi lebih aktif melakukan investasi usaha, pengembangan agroforestri, dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu karena adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan. Bida dan Nurdin (2025) serta Sutejo (2014) menjelaskan bahwa perhutanan sosial merupakan instrumen penting dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan hutan. Dengan demikian, kebijakan perhutanan sosial memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

Dari sisi kebijakan publik, efektivitas program perhutanan sosial memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan dan dukungan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya perlu memberikan legalitas pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga harus memperkuat akses pembiayaan, pelatihan, teknologi, dan pemasaran hasil produksi masyarakat. Program perhutanan sosial akan lebih efektif apabila diintegrasikan dengan kebijakan pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan usaha mikro masyarakat, dan pembangunan sektor pertanian berbasis kawasan hutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program perhutanan sosial di Kecamatan Sembalun memiliki efektivitas yang cukup baik dalam meningkatkan pendapatan kelompok tani hutan. Namun demikian, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan masyarakat, dukungan pemerintah, akses ekonomi, dan keberlanjutan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan kelompok tani

hutan dan optimalisasi dukungan kebijakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan program perhutanan sosial di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program perhutanan sosial di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, memiliki efektivitas yang cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan kelompok tani hutan dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Program perhutanan sosial memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan melalui kegiatan agroforestri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal. Keberadaan legalitas pengelolaan kawasan hutan mendorong masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan. Peningkatan pendapatan masyarakat terlihat melalui diversifikasi sumber ekonomi, terutama dari pengembangan komoditas agroforestri dan hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomi bagi kelompok tani hutan. Selain itu, program ini juga mendorong perubahan pola hubungan masyarakat dengan kawasan hutan dari pola pemanfaatan informal menjadi pengelolaan yang lebih terstruktur, legal, dan partisipatif.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa efektivitas program perhutanan sosial tidak hanya ditentukan oleh pemberian akses terhadap kawasan hutan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan, dukungan pemerintah, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha berbasis kehutanan. Kelompok tani hutan yang memiliki organisasi yang aktif dan partisipatif cenderung lebih mampu mengembangkan usaha produktif, memperluas jaringan pemasaran, dan memanfaatkan dukungan program pemerintah. Sistem agroforestri yang diterapkan dalam pengelolaan kawasan hutan terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pemanfaatan lahan yang lebih efisien dan konservatif. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa perhutanan sosial merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi lokal berbasis masyarakat sekaligus bagian dari kebijakan kehutanan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi program perhutanan sosial di Kecamatan Sembalun. Keterbatasan modal usaha, rendahnya kapasitas manajerial kelompok tani hutan, dan belum optimalnya akses pemasaran hasil produksi masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha berbasis kehutanan. Selain itu, pendampingan kelembagaan dan dukungan teknis dari pemerintah masih perlu diperkuat agar kelompok tani hutan mampu mengelola usaha secara lebih profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pendukung yang tidak hanya berfokus pada pemberian legalitas akses kawasan hutan, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, pengembangan teknologi produksi, dan perluasan jaringan pemasaran hasil hutan dan produk agroforestri.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum dan kebijakan perhutanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program perhutanan sosial harus dipahami secara multidimensional, yaitu mencakup aspek legalitas pengelolaan kawasan hutan, penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan pendapatan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan masyarakat desa hutan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki

keterbatasan karena fokus kajian hanya dilakukan pada wilayah Kecamatan Sembalun dengan pendekatan kualitatif. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar diperoleh analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program perhutanan sosial di berbagai daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A., & Mudhofir, M. R. T. (2024). Korelasi Faktor-Faktor Produksi Agroforestri terhadap Pendapatan Petani Hutan Kemasyarakatan. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Учредителу: Universitas Mataram, 10(4)*, 595-600. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i4.712>
- Bida, O., & Nurdin, N. H. (2025). Perhutanan Sosial Sebagai Instrumen Peningkatan Ekonomi Lokal: Telaah Implementasi Di Kabupaten Mamasa. *Journal Publicuho, 8(3)*, 1675-1686. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.887>
- Farhan, F., & Rachman, I. N. A. (2023). PEMANFAATAN POTENSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) TUAK MANIS TERHADAP PENDAPATAN PETANI PENGELOLA KAWASAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DESA KEKAIT KECEMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT. *Jurnal Silva Samalas, 6(1)*, 37-46. <https://doi.org/10.33394/jss.v6i1.8554>
- Fitria, L., & Arbain, A. (2024). Analisis Efektifitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari Dalam Mencapai Tujuan Program Perhutanan Sosial Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya:(Studi Kasus Hutan Nagari Pakan Rabaa Dan Hutan Nagari Pasir Talang Timur Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal Niara, 16(3)*, 590-598. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.18609>
- Harjono, E., Pellondo'u, M. E., & Mau, A. E. (2024). Peran Gabungan Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Terhadap Pendapatan Petani Gapoktan Mbohng Desa Bangka Lelak Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan, 19(2)*, 188-205. <https://doi.org/10.31849/forestra.v19i2.18373>
- Kartila, N., Ichsan, A. C., & Markum, M. (2018). Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu Kemiri (Aleurites moluccana) Terhadap Pendapatan Petani Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tangga Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Belantara, 1(2)*, 89-100. <https://doi.org/10.29303/JBL.V1I2.64>
- Kumbara, L. A. P. R., UMAR, U., & KHADAFIE, M. (2024). Pengaruh pengelolaan kawasan hutan terhadap aspek ekonomi dan sosial pada Kelompok Perhutanan Sosial Batu Akik Kecamatan Sekongkang. *GANEC SWARA Учредителу: Universitas Mahasaraswati Mataram, 18(4)*, 2103. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i4.1166>
- Markum, M., Ichsan, A. C., Saputra, M., & Mudhofir, M. R. T. (2021). Penerapan ragam pola agroforestri terhadap pendapatan dan cadangan karbon di kawasan hutan Sesaot Lombok Barat. *Jurnal Sains Teknologi dan Lingkungan, 67-83*. <https://doi.org/10.29303/jstl.v0i0.241>
- Mukhtar, M., & Jannah, W. (2018). Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal; Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 2(1)*. <https://doi.org/10.58258/jisip.v2i1.612>
- Permatasari, D., Fauzi, H., & Effendi, M. (2022). Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Aspek Ekonomi (Studi Kasus Pada Hutan Kemasyarakatan Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut). *Jurnal Sylva Scientae, 3(6)*, 1011-1019. <https://doi.org/10.20527/jss.v3i6.4716>
- PRATAMA, M., & ADIWIBOWO, S. (2020). PENGARUH PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN TERHADAP SISTEM TENURIAL DAN PENDAPATAN PETANI. *JURNAL SAINS KOMUNIKASI*

- DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT Учредителю: Institut Pertanian Bogor, 4(3), 275-288.*
<https://doi.org/10.29244/jskpm.4.3.275-290>
- Pratami, N. M., Helmi, M., & Asyisyifa, A. (2023). Kontribusi program agroforestri terhadap pendapatan masyarakat di Desa Hakim Makmur Kecamatan Sungai Pinang. *Jurnal Sylva Scientiae*, 6(3), 365-374. <https://doi.org/10.20527/jss.v6i3.9212>
- Prtama, D., Setiawan, B., & Ningsih, R. V. (2024). Analisis Pendapatan Usaha Kemiri (Aleurites moluccana) pada Kelompok Tani Hutan Wahana Kawasan di Kawasan Hutan Gunung Sasak Desa Kuripan Selatan, Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika*, 5(4), 738-748. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v5i4.491>
- Situmorang, M. T. N., & Noviana, L. (2022). Peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian hutan melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 68-75. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.68>
- Sutejo, P. (2014). Hubungan program pengelolaan hutan bersama masyarakat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi*, 2(1), 39-48.
- Tiga, E. K. I., Marimpan, L. S., Mau, A. E., & Rammang, N. (2025). Pengaruh Sistem Agroforestri Terhadap Pendapatan Anggota Kelompok Pengelola Hutan Kemasyarakatan Bu'u Bei di Desa Tina Bani Kecamatan Ende Kabupaten Ende. *Wana Lestari*, 7(1), 001-012. <https://doi.org/10.35508/wanalestari.v7i01.19204>
- Yakin, A., Malik, S., Yusuf, M., & Husni, S. (2019). Dampak hutan kemasyarakatan terhadap pengentasan kemiskinan rumahtangga sekitar hutan di kecamatan batukliang utara kabupaten lombok tengah. *Jurnal Agrimansion*, 20(1), 19-30. <https://doi.org/10.29303/AGRIMANSION.V20I1.259>
- Zet, L., Purwanti, F. I., Rudiana, E., Hakim, H. N., & Adnan, M. (2022). Peran program perhutanan sosial dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga di sekitar kawasan hutan (studi kasus indepth interview perhutanan sosial fungsi statistik kehutanan BPS 2021). *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 6(2), 179-187. <https://doi.org/10.32522/ujht.v6i2.8452>